

HUBUNGAN ANTARA IMPLEMENTASI SAKD DENGAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Nurmiati¹, Bastian Lubis², Suryadi³

^{1,2}Universitas Patria Artha

³Kantor Kecamatan Tallo Makassar

Email: nurmiati@patria-artha.ac.id¹, lubisbatian@gmail.com², abu.ilmi@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to determine the level of closeness of the relationship between SAKD implementation and the quality of financial statements. Respondents in this study were all employees at the Tallo Makassar Office as many as 30 people determined by purposive sampling, data collection techniques using questionnaires distributed to all respondents with data analysis used was correlation analysis. The results showed that the relationship between the implementation of the Regional Financial Accounting System (SAKD) and the quality of financial statements in the Tallo District Office of Makassar City was in the same direction and positive where the better the implementation of the Regional Financial Accounting System (SAKD) would improve the quality of financial statements.

Keywords: *Regional Financial Accounting System, Financial Statements*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara implementasi SAKD dengan kualitas laporan keuangan. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Kantor Kecamatan Tallo Makassar sebanyak 30 Orang yang ditentukan secara purposive sampling, teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada seluruh responden dengan analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dengan kualitas laporan keuangan Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar adalah searah dan positif dimana semakin baik implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan good governance dan clean government dengan

melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula. Dalam menghasilkan suatu nilai informasi keuangan yang bernilai (keterandalan) dipengaruhi dua elemen pokok yaitu, informasi yang dihasilkan dan

sumber daya menghasilkannya. Menyangkut informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai kemampuan dalam informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota yang melakukan pemrosesan transaksi keuangan baik arus uang maupun barang untuk menghasilkan laporan keuangan (Abidin, 2013). Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana.

Setiap pemerintah daerah termasuk Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar diwajibkan menyusun laporan keuangan yang setiap tahunnya akan dinilai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana setiap laporan keuangan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo, anggaran lebih,

hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi mengenai alokasi sumber daya. Dengan demikian dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sebuah sistem akuntansi yang terintegrasi untuk menampung seluruh data keuangan secara akurat dan andal, untuk itu dibutuhkan sebuah software dalam hal ini sistem akuntansi keuangan daerah yang didukung oleh sumber daya manusia pengelola keuangan yang kompeten di bidang akuntansi untuk menjalankan software tersebut. Sebuah laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah yang dinilai berkualitas apabila memenuhi kriteria: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Mahmudi, 2016:11).

Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana tingkat keeratan hubungan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dengan kualitas laporan keuangan.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2013:43), yang dimaksud dengan akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan

sebagai berikut “proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan”.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 menerangkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut “sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah”.

Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa SAKD adalah Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan penggolongan, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer. Dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan seluruh bukti atas setiap transaksi yang dilakukan, lalu dilakukan pencatatan secara kronologis atas transaksi

yang terjadi, selanjutnya dilakukan penggolongan sesuai dengan pos-pos yang sudah diatur, dan dibuatlah laporan keuangan Daerah guna pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah maupun pemangku kepentingan. Kepala Daerah menetapkan SAKD berfokus pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang disusun dengan mengacu pada prinsip pengendalian intern. Ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan SAKD. Sistem akuntansi keuangan daerah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sistem akuntansi keuangan Daerah secara garis besar terdiri dari empat prosedur akuntansi, yaitu prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, aset, dan selain kas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam

rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sedangkan Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dengan demikian sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah penerapan sistem informasi akuntansi tersebut oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Mahmudi (2016:11) pemerintah daerah harus terus berupaya memperbaiki kualitas laporan keuangannya. Laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri berikut:

1. Relevan, artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan. Relevansi laporan keuangan terkait dengan:
 - a. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk memprediksi (*prediktive value*), yaitu memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan, dan kinerja di masa datang.
 - b. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan balik dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang (*feedback value*).
 - c. Laporan keuangan dipublikasikan tepat waktu (*timeliness*). Laporan keuangan yang baik harus disajikan tepat waktu, sebab nilai atau manfaat suatu informasi akan berkurang jika terlambat disampaikan.
2. Andal (*Reliability*), artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi. Laporan keuangan yang andal memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Disajikan secara jujur (*faithfulness of presentation*), yaitu laporan keuangan terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan.
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), yaitu informasi dalam laporan keuangan dapat diverifikasi kebenarannya melalui proses audit laporan keuangan.
 - c. Netral dalam penyajian (*neutrality*), yaitu penyajian laporan keuangan tidak bersifat tendensius dan bias terhadap kepentingan kelompok tertentu.
3. Dapat dibandingkan (*comparability*), artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai perbandingan kinerja masa lalu atau perbandingan kinerja organisasi lain yang sejenis.
 4. Dapat dipahami (*understandability*), artinya laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan.”
- Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
1. Relevan
Laporan keuangan relevan apabila informasi yang dimuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
 2. Andal
Informasi laporan keuangan bebas dari laporan keuangan yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
 3. Dapat Dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal

dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang sesuai dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna asumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan yang dilakukan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.”

Adapun hipotesis yang dikemukakan yaitu:

H₁: Hubungan antara implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dengan kualitas laporan keuangan adalah positif dan signifikan.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Tallo Kota Makassar sebanyak 146 pegawai. Penentuan sampel dalam penelitian dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu pegawai pada bagian keuangan sebanyak 30 orang pegawai.

Teknik Pengumpulan Data

1. Kuisisioner digunakan untuk mengumpulkan data berupa data primer tentang pendapat responden terkait dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan kualitas laporan keuangan.
2. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa gambaran umum Kantor Kecamatan Tallo.

Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah Analisis inferensial adalah teknik pengolahan data untuk menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitiannya pada sejumlah sampel terhadap populasi. Adapun langkah-langkah yang akan digunakan untuk menguji data pertama dengan

menggunakan korelasi untuk mencari nilai korelasi, sehingga diketahui tingkat r. Selanjutnya data hasil hitung korelasi hubungan variabel X terhadap Y besar atau disesuaikan dengan pedoman untuk kecil.. Adapun rumus menurut Sugiyono, memberikan Interpretasi koefisien (2013:183) sebagai berikut:

$$r = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \times \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana :

R = koefisien korelasi variabel x dengan variabel y.

XY = jumlah hasil perkalian antara variabel x dengan variabel y.

X = Gaya Mengajar Guru

Y = Minat Belajar Siswa

N = jumlah subyek penelitian.

Untuk menentukan seberapa besar tingkat hubungan antara variabel dalam penelitian ini dapat disajikan pada tabel 1.

Tabel 1
Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,200 - 0,399	Rendah
0,400 – 0,599	Sedang
0,600 – 0,799	Kuat
0,800 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2013:184)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Tallo

Kecamatan Tallo terdiri dari 15 kelurahan dengan luas wilayah 5,83 km². Dari luas wilayah tersebut kelurahan Lakkang memiliki wilayah terluas yaitu 1,15 km², terluas kedua adalah kelurahan Tammua dengan luas wilayah 0,62 km², sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah kelurahan Wala-walaya dengan luas 0,11 km.

Visi Kecamatan Tallo Tahun 2014-2019 adalah “Mewujudkan Kecamatan Tallo sebagai Pelayan Publik yang Ramah untuk Semua”. Dua pernyataan Visi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Tallo yaitu:

1. Pelayan Publik yang Ramah: Kecamatan Tallo sebagai pelayan Publik yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan masyarakat akan mengedepankan pelayanan yang ramah, nyaman dan cepat dalam

pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Visi ini dikaitkan dengan program Walikota Makassar yaitu Sombere dan *Smart City*, maka diharapkan seluruh aparat Kecamatan dan Kelurahan harus menerapkan Pelayanan yang ramah untuk semua.

2. Untuk Semua : sebagai pelayan publik yang ramah, pemerintah kecamatan Tallo sesuai tugas dan fungsinya dapat melayani semua masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial baik perorangan maupun kelompok, dengan visi ini diharapkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dapat seiring sejalan dalam membangun Kecamatan Tallo dan Kota Makassar dua kali tambah baik.

Kecamatan Tallo sebagai perangkat daerah Kota Makassar dapat menjabarkan visi dan misi Pemerintah Kota Makassar sesuai tugas dan fungsinya, maka dirumuskan misi pemerintah Kecamatan Tallo sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan publik yang cepat dan ramah.
2. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui UKM.
3. Peningkatkan kualitas lingkungan yang asri dan nyaman.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Tallo Kota Makassar sebagai berikut:

Tujuan

1. Meningkatnya pelayanan publik.
2. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas lingkungan.

Sasaran

1. Meningkatkan Pelayanan Publik
 - a. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.
 - c. Meningkatkan disiplin aparatur.
 - d. Meningkatkan SDM aparatur kecamatan dan kelurahan.
 - e. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat
 - a. Meningkatkan UKM melalui fasilitasi pelayanan KBT.
 - b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
 - c. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan

3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan **Analisis Deskriptif**
- a. Meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan. Hasil analisis deskriptif yang menggambarkan tanggapan responden
- b. Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan pegawai terhadap implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
- c. Meningkatkan infrastruktur diuraikan pada tabel berikut ini.
- d. Meningkatkan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Tabel 2
Analisis Frekuensi Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Item	Indikator SAKD	SS	S	KS	TS	STS
X1.1	Kesesuaian dengan Sistem Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	36,7%	63,3%	0%	0%	0%
X1.2	Pengidentifikasian transaksi	56,7%	40%	3,3%	0%	0%
X1.3	Pencatatan transaksi	63,3%	33,3%	3%	0%	0%
X1.4	Bukti setiap transaksi	56,7%	40%	3,3%	0%	0%
X1.5	Pencatatan Kronologis	56,7%	40%	3,3%	0%	0%
X1.6	Pengklasifikasian Transaksi	33,3%	66,7%	0%	0%	0%
X1.7	Pelaporan Keuangan Secara Periodik	43,3%	53,3%	3,3%	0%	0%
X1.8	Pelaporan yang konsisten	40%	53,3%	3,3%	3,3%	0%

Berdasarkan hasil analisis Tallo Makassar telah frekuensi tentang tanggapan responden mengimplementasikan Sistem Akuntansi terhadap implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dalam Keuangan Daerah (SAKD), maka pengelolaan keuangannya.

umumnya responden memberikan Hasil analisis deskriptif yang tanggapan sangat setuju diikuti oleh menggambarkan tanggapan responden jawana setuju dan kurang setuju. Dengan pegawai terhadap kualitas laporan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keuangan Kecamatan Tallo Makassar keseluruhan pihak Kantor Kecamatan diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3
Analisis Frekuensi Kualitas Laporan Keuangan

Item	Indikator Kualitas Laporan Keuangan	SS	S	KS	TS	STS
Y1	Manfaat laporan keuangan	36,7%	53,3%	6,7%	3,3%	0%
Y2	Ketepatan penyajian laporan keuangan	33,3%	46,7%	20%	0%	0%
Y3	Kelengkapan informasi yang disajikan	36,7%	50%	10%	3,3%	0%
Y4	Penyajian secara jujur	30%	60%	10%	0%	0%
Y5	Isi laporan keuangan dapat diverifikasi	16,7%	73,3%	10%	0%	0%
Y6	Keakuratan informasi yang disajikan	20%	53,3%	20%	6,7%	0%
Y7	Isi laporan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya	23,3%	63,3%	13,3%	0%	0%
Y8	Kejelasan informasi dalam penyajian laporan keuangan	23,3%	63,3%	10%	3,3%	0%

Berdasarkan hasil analisis frekuensi tentang tanggapan responden terhadap kualitas laporan keuangan, maka umumnya responden memberikan tanggapan setuju diikuti oleh jawaban sangat setuju, kurang setuju dan tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pada Kantor Kecamatan Tallo Makassar masih perlu ditingkatkan sehingga mampu memberikan informasi secara transparan dan akuntabel terhadap seluruh stakeholder.

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa melalui implementasi sistem akuntansi daerah pada Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar maka sistem pelaporan keuangan yang dibuat, memiliki kesesuaian sistem dengan Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP), untuk menjaga validitas laporan keuangan, bukti-bukti transaksi diarsipkan berdasarkan jenisnya, seluruh bentuk transaksi, baik transaksi kecil maupun besar dicatat dengan baik dan teliti disertai dengan bukti-bukti transaksi, yang dilengkapi dengan hari, tanggal terjadinya transaksi, pengelola keuangan telah memahami penatausahaan keuangan berdasarkan pengklasifikasian transaksi (*intern/ekstern*) sesuai ketentuan, laporan keuangan disusun setiap periode akuntansi yang berlaku secara konsisten dan periodik berdasarkan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Analisis Korelasi

Untuk mengetahui hubungan antara implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dengan kualitas laporan

keuangan maka digunakan analisis korelasi. Adapun hasil analisis korelasi dapat disajikan pada tabel 4.

Tabel 4
Hasil Analisis Korelasi Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dengan Kualitas Laporan Keuangan Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar

		X	Y
X	Pearson Correlation	1	.635**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	30	30
Y	Pearson Correlation	.635**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel 4 terlihat angka korelasi antara implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dengan kualitas laporan keuangan Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar yaitu sebesar 0,635. Angka ini merupakan angka yang positif menunjukkan bahwa hubungan antara implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dengan kualitas laporan keuangan adalah positif dimana semakin baik implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) maka kualitas laporan keuangan semakin meningkat. Korelasi keduanya bersifat signifikan karena nilai signifikansinya sebesar 0,000 atau lebih kecil dari angka signifikansi 0,05.

Dengan memperhatikan tabel interpretasi koefisien korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat karena nilai 0,635 berada pada kisaran 0,600 – 0,799. Dengan demikian hipotesis dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan kuat antara implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dengan kualitas laporan keuangan Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar.

Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) pada Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar membawa perbaikan pada kualitas laporan keuangan, dimana melalui penerapan sistem akuntansi daerah maka laporan

keuangan yang dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

pihak Kantor Kecamatan Tallo Makassar harus terus di up date sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang sering mengalami perubahan sehingga tidak menghambat waktu penyajian laporan keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil analisis korelasi menunjukkan hubungan antara implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dengan kualitas laporan keuangan Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar adalah searah dan positif dimana semakin baik implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan demikian pula sebaliknya dan korelasi keduanya bersifat signifikan, jika memperhatikan tabel interpretasi koefisien korelasi menunjukkan bahwa tingkat keeratan hubungan antara implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dengan kualitas laporan keuangan Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar berada pada kategori kuat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan agar sistem informasi keuangan daerah yang telah dibangun oleh

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2013, Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat: Jakarta.
- Abidin, Ardan, 2013, Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo), Universitas Gorontalo.
- Mahmudi, 2016, Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013

Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Kompetensi Manajerial
PNS.

Sugiyono, 2013, Metode Penelitian
Pendidikan Pendekatan
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Rosdakarya, Bandung.